

DINAMIKA PERJUANGAN STATUS POLITIK PAPUA: PERAN ELITE POLITIK PAPUA PERIODE 1949–1961

Bernarda Meteray

Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua

Email: bernardameteray@gmail.com

Accepted: 2 Desember 2024; Revised: 19 Maret 2025; Approved: 19 Maret 2025

Abstrak

Keterlibatan elite politik Papua berpengaruh pada Perundingan New York 1962, membantah anggapan mereka terbelakang atau pasif. Peran mereka dalam sejarah patut diakui dan ditinjau kembali secara objektif. Untuk memperoleh data maka metode yang digunakan adalah rekonstruksi historis. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui 1) elite politik Papua yang terlibat dalam perjuangan status politik Papua (1949–1961), 2). strategi yang digunakan elite politik Papua dalam memperjuangkan status politik Papua 1949–1961, 3) dampak keterlibatan elite politik Papua terhadap dinamika sosial dan politik saat itu. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa 1) Elite politik Papua berasal dari berbagai profesi, termasuk guru, polisi, dan pegawai pemerintah yaitu Corinus Krey, Silas Papare, dan Marthin Indey berpihak pada Indonesia, sementara Johan Ariks, Nicolaas Jouwe, dan Lodewik Mandatjan mendukung Belanda. 2) Elite politik Papua mengadakan rapat-rapat penting, menyusun resolusi, mengirim surat, dan berpartisipasi dalam pertemuan di Jakarta, Yogyakarta, serta Belanda. 3). Perjuangan elite politik Papua tidak selalu berdampak langsung pada kebijakan kolonial atau Indonesia. Namun kesadaran politik Papua pun berkembang, membentuk identitas dan aspirasi dalam perjuangan

Kata Kunci: Elite, Papua, pemerintah, Partai dan Politik

Abstract

The involvement of the Papuan elite was influential in the 1962 New York Negotiations, refuting the notion that they were backward or passive. Their role in history deserves to be acknowledged and reviewed objectively. To obtain data, the method used is historical reconstruction. This study aims to identify 1) the Papuan political elite involved in the struggle for Papua's political status (1949-1961), 2) strategies used by Papuan political elites in fighting for Papua's political status from 1949-1961, 3) the impact of the involvement of Papuan political elites on social and political dynamics at that time. The results of this study show that 1) Papua's political elite comes from various professions, including teachers, police, and government employees, such as Corinus Krey, Silas Papare, and Martin Indey, who side with Indonesia. At the same time, Johan Ariks, Nicolaas Jouwe, and Lodewik Mandatjan support the Netherlands. 2) The Papuan political elite held important meetings, drafted resolutions, sent letters, and participated in meetings in Jakarta, Yogyakarta, and the Netherlands. 3). The struggles of the Papuan political elite do not always have a direct impact on colonial or Indonesian policies. However, Papuan political awareness is also growing, forming identity and aspirations in the struggle.

Keywords: Elite, Papua, Government, Parties and Politics

PENDAHULUAN

Masalah Papua mulai menjadi perhatian besar setelah integrasi melalui Perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, yang dianggap kontroversial. Meskipun Papua secara resmi menjadi bagian dari Indonesia, beberapa kelompok masih

menolak klaim tersebut dan menginginkan kemerdekaan. Ketegangan antara Jakarta dan Papua terus berlanjut, ditandai dengan gerakan separatis, operasi militer, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan politik. Konflik ini memperburuk hubungan antara

pemerintah pusat dan masyarakat Papua, yang merasa kurang mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Hingga kini, upaya penyelesaian konflik masih menjadi tantangan besar bagi stabilitas nasional dan integrasi Indonesia.

Salah satu puncak ketegangan konflik Papua, menurut Sehrenneta Bella Fiona dan Retno Kusniati (2020: 6), adalah ketika Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menyusup sebagai delegasi Vanuatu dalam kunjungan kehormatan ke Kantor Komnas HAM (KTHAM) pada 25 Januari 2019. Kehadirannya menimbulkan kontroversi, mengingat perannya dalam gerakan separatis Papua yang menentang kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Dalam pertemuan dengan PBB, Benny Wenda menyerahkan petisi berisi 1,8 juta tanda tangan kepada Michelle Bachelet, Direktur Hak Asasi Manusia PBB.

Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memprotes keras tindakan Vanuatu yang dianggap tidak menghormati kedaulatan Indonesia karena memfasilitasi Benny Wenda dalam isu Papua. Pada sidang PBB tahun 2023, isu Papua tidak menjadi pembahasan. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, dalam jumpa pers pada Jumat, 29 September 2023 di Jakarta, NKRI sudah semakin dihormati oleh negara-negara lain.

Di bagian lain, Untung Suropati (2019: 86) menegaskan bahwa dari perspektif yang lebih ideologis, kompleksitas permasalahan Papua secara substansial sebenarnya merupakan persoalan pemahaman dan relasi antara konsep keindonesiaan dan kepapuaan. Sementara itu, menurut Rochdi Mohan Nazala (2022: 224), masalah Papua sebenarnya bukanlah persoalan sederhana seperti yang diperlihatkan oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri RI maupun Untung Suropati. Pernyataan Rochdi mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (KEMLU), masih berupaya merumuskan strategi diplomasi untuk menghadapi tekanan internasional terkait isu Papua. Kehadiran Benny Wenda di Vanuatu mencerminkan langkah kelompok pro-kemerdekaan Papua dalam mencari dukungan

internasional, yang berpotensi memperkuat desakan terhadap Indonesia di forum global seperti PBB. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia, karena dapat memicu perhatian global yang lebih besar terhadap isu Papua.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, status Papua menjadi sengketa berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda. Meskipun Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 mengakui kedaulatan Indonesia, status Papua tetap belum ditetapkan dan menjadi objek negosiasi lebih lanjut. Belanda bersikeras mempertahankan Papua dengan memberikan status khusus, yang memperburuk hubungan dengan Indonesia. Ketegangan ini tidak hanya terjadi antara kedua negara, tetapi juga di kalangan elite Papua yang memiliki beragam pandangan politik. Sejumlah tokoh Papua pun muncul dalam upaya menentukan masa depan politik Papua, baik dalam mendukung integrasi dengan Indonesia maupun mempertahankan identitas tersendiri.

Beberapa elite politik Papua mendukung integrasi Papua ke dalam Indonesia karena melihat hal itu sebagai langkah yang lebih realistis dan menguntungkan, mengingat Indonesia telah merdeka dan sedang memperjuangkan kemerdekaan seluruh wilayahnya, termasuk Papua. Namun, tidak semua elite Papua sepakat dengan keputusan untuk bergabung dengan Indonesia. Kelompok elite lainnya menginginkan Papua memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Beberapa tokoh politik Papua yang memiliki kedekatan dengan Belanda berusaha mendapatkan dukungan internasional guna mempertahankan status Papua di bawah pemerintahan Belanda. Di saat yang sama, mereka juga berupaya memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB), persaingan antara elite politik Papua semakin tajam, terutama dalam menentukan arah masa depan Papua. Dua tokoh utama, Silas Papare dan Johan Ariks, menjadi simbol dari dua kubu yang berseberangan. Silas Papare mendukung integrasi Papua dengan Indonesia, sedangkan Johan Ariks berpihak pada Belanda yang ingin

mempertahankan kendali atas Papua. Dalam situasi ini, baik kubu pro-Indonesia maupun pro-Belanda berupaya mencari dukungan nasional dan internasional untuk memperkuat posisi politik mereka.

Menjelang Desember 1961, ketegangan politik di Papua semakin meningkat. Pada 1 Desember 1961, di depan gedung Dewan Nieuw Guinea, nama Nieuw Guinea resmi diubah menjadi Papua Barat. Untuk pertama kalinya, bendera Papua dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan sebagai simbol aspirasi kemerdekaan. Belanda berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan mendukung langkah ini, sementara Indonesia merespons dengan mengumandangkan Trikora di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Trikora menjadi awal konfrontasi militer dan diplomasi. Hingga kini, perpecahan elite Papua antara kubu pro-Indonesia dan pro-kemerdekaan masih mempengaruhi dinamika politik serta konflik di Papua.

Kajian mengenai peran elite politik Papua dalam periode 1949–1961 masih minim mendapat perhatian akademis. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada elite lokal Papua di masa kontemporer, seperti yang dikemukakan I Ngurah Suryawan (2011:141), yang menyoroti konflik horizontal di Papua sebagai hasil konstruksi pemerintah Indonesia melalui elite lokal sebagai perpanjangan kebijakan negara. Sementara itu, Silvia Lili (2023:374) melihat pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan elite pemerintah lokal, namun masih menghadapi penolakan dari beberapa tokoh.

Kurangnya kajian historis mengenai elite Papua di masa lalu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap dinamika politik Papua memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, kajian mengenai peran elite politik Papua dalam sejarah politik sangat penting untuk memahami dinamika konflik dan upaya perdamaian di Papua. Muridan dalam Meteray (2012: XXIII) menegaskan bahwa masa lalu Papua tidak dapat diabaikan dalam membahas dialog Papua damai. Sejarah menjadi aspek krusial karena berkaitan erat dengan identitas dan kepentingan masyarakat Papua saat ini dan

masa depan. Dalam perspektif ini, Muridan melihat sejarah sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan konflik, sedangkan Meteray menekankan bahwa pengungkapan sejarah adalah keharusan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami situasi saat ini (2021:299).

Dengan mengungkap keterlibatan elite politik Papua dalam memperjuangkan status politik Papua, terbukti bahwa orang Papua bukanlah pihak yang pasif atau terbelakang dalam panggung sejarah, melainkan aktor aktif dalam menentukan nasib politik wilayahnya. Dengan memahami peran mereka, ruang dialog damai dapat lebih terbuka. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengidentifikasi elite politik Papua yang berperan dalam perjuangan status politiknya, strategi yang mereka gunakan, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik. Memahami sejarah secara objektif dapat membuat resolusi konflik Papua menjadi lebih efektif, membuka ruang dialog, dan mencegah kesalahpahaman di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA: Elite Politik dalam Perspektif Sosiologis dan Historis

Kata *elite*, menurut pemikiran Pareto (dalam Bottomore, 2006:1), merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang unggul. Kelompok ini menempati posisi puncak dalam struktur masyarakat dan memiliki pengaruh yang menentukan. Mereka bukanlah orang biasa karena memiliki posisi strategis serta pengaruh dalam pengambilan keputusan. Bottomore (2006:85) menjelaskan bahwa pada abad ke-20, elite terdiri atas tiga kelompok utama: kelompok intelektual, manajer, dan birokrat. Kelompok-kelompok ini sering dipilih sebagai pewaris fungsi kelas penguasa dan memainkan peran vital dalam pembentukan masyarakat baru.

Menurut Bottomore (2006:122), di negara-negara tertinggal, elite politik memegang peran dominan dalam menentukan arah wacana pembangunan. Elite ini umumnya berasal dari pemimpin nasional dan kaum intelektual revolusioner, yang dalam beberapa kasus saling berbaur. Di Asia dan Afrika, kaum intelektual

memainkan peran besar dalam perjuangan melawan kolonialisme. Bottomore (2006:123–124) memberikan contoh di Nigeria, di mana elite baru yang berpendidikan Barat mulai menggantikan elite lama dari pemerintahan tradisional seiring dengan berkembangnya gerakan kemerdekaan.

Fenomena serupa terjadi di Ghana. Setelah pemilu tahun 1954, komposisi anggota parlemen menunjukkan dominasi kelompok terdidik dan profesional. Sebanyak 29 persen anggotanya berasal dari kalangan guru, 17 persen dari juru tulis, akuntan, dan profesi administratif lainnya, serta 17 persen dari kelompok profesional liberal seperti pengacara dan dokter. Ini mencerminkan pergeseran politik dari dominasi elite tradisional menuju kepemimpinan berbasis pendidikan dan keterampilan modern. Di Majelis Perwakilan delapan Teritori French West Africa setelah pemilu tahun 1957, komposisi anggota juga menunjukkan dominasi kaum intelektual dan profesional: 22 persen adalah guru, 27 persen pejabat pemerintah, dan 20 persen berasal dari profesi liberal. Hal ini menegaskan bahwa di banyak negara pascakolonial, elite baru yang berpendidikan memegang peran sentral dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan politik.

Sementara itu, Van Niel (1984:12) menjelaskan bahwa elite di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yakni elite tradisional dan elite modern. Elite tradisional bersifat turun-temurun, di mana status dan kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan, biasanya berasal dari keluarga bangsawan atau kelompok sosial yang memiliki legitimasi historis. Sebaliknya, elite modern lebih beragam, karena didasarkan pada pendidikan dan kompetensi individu. Menurut Van Niel, elite modern mencakup administrator, pegawai pemerintah, teknisi, profesional, dan intelektual. Mereka memperoleh status melalui jalur pendidikan dan keterampilan yang mendukung peran mereka dalam pembangunan negara.

Van Niel juga membagi elite modern menjadi dua subkategori: elite fungsional dan elite politik. Elite fungsional terdiri dari mereka yang memiliki keahlian teknis dan

profesional dalam menjalankan administrasi serta pembangunan, seperti birokrat, akademisi, dan pengusaha. Sementara itu, elite politik adalah kelompok yang terlibat langsung dalam aktivitas politik, dengan tujuan yang bervariasi tetapi umumnya berkaitan dengan perubahan dalam struktur kekuasaan.

Dalam perspektif sosiologi, David Jarry dan Julia Jarry (dalam Maysarah Harahap, Ruth Nadya, Winanda Sitanggang, dan Jamaludin, 2023:2156) menyatakan bahwa elite adalah kelompok masyarakat yang paling berbakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, agama, dan institusi. Elite politik, khususnya, memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan. Teori elite menyatakan bahwa pemisahan antara elite dan masyarakat biasa merupakan karakteristik yang tidak terhindarkan dalam masyarakat modern yang kompleks.

Sejalan dengan itu, Mills (dalam Harahap et al., 2023:2155) menyatakan bahwa elite terdiri dari mereka yang menduduki posisi puncak dalam institusi ekonomi, militer, dan politik. Mereka membentuk kelompok elite kekuasaan yang memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan masyarakat. Kelompok ini sering bersatu dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap struktur sosial dan ekonomi. Namun, menurut Mills, elite kekuasaan bukanlah kelompok yang sepenuhnya tertutup atau statis. Perbedaan kepentingan di antara mereka menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu bersifat terpadu. Pareto juga menambahkan bahwa dalam setiap kelas sosial terdapat individu yang memiliki bakat dan kemampuan berbeda, yang memungkinkan mereka naik ke tingkat elite.

Pasca Perang Dunia II, pemerintahan Belanda di Papua menghadapi kekurangan tenaga pegawai di berbagai sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak guru sekolah kampung diberi kesempatan bekerja di bidang pemerintahan. Mereka diikutsertakan dalam kursus pelatihan di bidang pemerintahan, kesehatan, pertanian, dan militer. Program ini memungkinkan mereka memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung administrasi kolonial Belanda di Papua. Akibatnya, elite politik Papua

yang muncul pada masa itu terdiri dari guru sekolah kampung, polisi, mantri pertanian dan kesehatan, serta pegawai pemerintah tingkat kampung dan distrik. Kelompok ini menempati posisi istimewa karena memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan formal yang lebih baik dibandingkan masyarakat umum.

Dengan demikian, elite politik adalah kelompok yang memiliki peran penting dalam pemerintahan serta berpartisipasi dalam proses legislasi, partai politik, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi perubahan sosial dan politik. Dalam konteks Papua pada periode 1949–1961, elite politik terdiri dari guru sekolah kampung, polisi, mantri pertanian dan kesehatan, serta pegawai pemerintah tingkat lokal. Mereka juga mencakup individu-individu yang terlibat langsung dalam aktivitas politik pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintah kolonial memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk menduduki posisi dalam pemerintahan lokal, yang secara tidak langsung mendorong keterlibatan mereka dalam politik. Beberapa tokoh Papua mulai tampil sebagai pemimpin yang aktif dalam perdebatan mengenai masa depan Papua, baik dalam hubungannya dengan Belanda maupun dengan Indonesia.

PEMBAHASAN

Awal Munculnya Elite Politik Papua

Pembentukan awal elite Papua dimulai ketika Belanda membenahi administrasi pemerintahan di Papua pada awal 1945. Pemerintah Belanda membutuhkan tenaga lokal untuk mendukung pemerintahan, sehingga mereka mulai mendidik masyarakat Papua dalam berbagai bidang. Di bagian utara Papua, guru yang merupakan lulusan pendidikan guru di Miei diberikan kesempatan untuk bekerja di sektor pelayaran, kesehatan, militer, dan kepolisian. Sementara itu, bagi guru yang tidak ingin mengajar, mereka diberikan peluang luas untuk menjadi *bestuur* (pamong praja).

Pada Januari 1945, pemerintah Belanda mendirikan berbagai kursus termasuk kursus pamong praja selama enam bulan di Kota Nica, untuk mencetak generasi pemimpin

Papua yang diharapkan mendukung kebijakan kolonial. Kursus ini menjadi salah satu upaya Belanda dalam membina tenaga administrasi pemerintahan lokal. Salah satu tokoh penting dalam proses ini adalah Soegoro Atmoprasodjo, seorang pendidik asal Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai bekas tawanan Digul. Lahir di Yogyakarta pada 23 Oktober 1923, Soegoro ia kemudian ditunjuk oleh Van Eechoud sebagai pengajar dan direktur asrama pada Kursus Singkat Pamong Praja di Kota Nica, yang kini dikenal sebagai Kampung Harapan. Dalam perannya, Soegoro tidak hanya mengajarkan administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkenalkan konsep nasionalisme kepada para siswa Papua.

Soegoro Atmoprasodjo berkontribusi besar dalam pendidikan dan pembinaan calon elite Papua yang akan berperan dalam pemerintahan lokal. Melalui perannya sebagai pengajar di Kursus Singkat Pamong Praja, ia membantu mencetak pemimpin terdidik dengan keterampilan administrasi yang dibutuhkan untuk mengelola daerah mereka. Kebijakan ini menandai munculnya kelompok elite Papua yang memiliki kemampuan dalam bidang pemerintahan. Peserta kursus ini berasal dari putra-putra Papua umumnya mempunyai latar belakang guru, mantri yang diberi kesempatan untuk dapat bekerja di bidang pemerintahan. Orang Papua yang merupakan elit Papua pertama yang terlibat dalam pendidikan di Kota Nica (sekarang Kampung Harapan Jayapura) ini antara lain; Markus Kaisepo, Lukas Rumkorem, Lisias Simbiak, Frans Kaiseppo, Nikolas Youwe, Marten Indey, Cornelis Krey, Silas Papare, B. Mofu, O. Manupapami dan Herman Wayoi (Meteray, 2012:54).

Komite Indonesia Merdeka (KIM) di Jayapura

Perjuangan menentang Belanda di Papua demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia mulai digagas oleh Soegoro Atmoprasodjo. Namun, langkah konkret dalam bentuk organisasi politik baru dimulai pada 16 November 1946, ketika J. Gerungan mendirikan Partai KIM (Kelompok Indonesia Merdeka) di Hollandia

Binnen (kini Abepura, Jayapura). Sebagai partai politik pertama di Papua, KIM menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat Papua yang mendukung integrasi dengan Indonesia dan menolak kolonialisme Belanda. Melalui KIM, para aktivis pro-kemerdekaan membangun kesadaran politik serta menggalang dukungan untuk menjadikan Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Riwayat Hidup, Krey, 7 Agustus 1990).

Keanggotaan KIM sangat beragam, terdiri dari berbagai suku dan latar belakang. Anggota pentingnya antara lain Poedjasoebrata, seorang bekas asisten HPB asal Jawa yang bertugas di dinas penerangan (RVD); Corinus Krey, seorang mantri di rumah sakit Hollandia Binnen; Petrus Wettebossy, mantri asal Bintuni; Marthen Indey, pembantu asisten *bestuur* di Arso; Latuperrisa asal Ambon, bekas pengajar di Sekolah Pamong Praja; serta Pani Nasution dan Bastian Tauran (Aditjondro, 1997:116).

Sebagai upaya merespons situasi politik pasca Perjanjian Linggajati, pada 11 Desember 1946, Van Eechoud selaku pejabat Gubernur Papua mengundang sejumlah tokoh Papua untuk menghadiri pertemuan penting. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Corinus Krey, Spener Malibella asal Sorong, Alex Beratoboiei asal Japen, dan Petrus Wettebossy. Selain itu, hadir pula Nicolaas Jouwe dan Lucas Jouwe asal Kayu Pulau, Mallo dari Skou, Barnabas Jufuay dari Depapre, Andreas Mano dari Tobati, serta Marthen Indey dari Doromena (Courtouis, 1948:126).

Pertemuan ini bertujuan menjelaskan posisi Papua dalam Perjanjian Linggajati. Van Eechoud menyampaikan dua poin penting: pertama, bahwa Papua akan memiliki status khusus di luar Indonesia; kedua, bahwa Belanda memutuskan untuk tidak mengirim wakil dari Papua dalam Konferensi Denpasar di Bali pada Desember 1946, karena dianggap belum ada tokoh Papua yang layak mewakili. Penjelasan ini sangat menentukan arah masa depan politik Papua.

Namun, hasil pertemuan tersebut sangat mengecewakan para tokoh Papua. Sebagai bentuk perlawanan, pada 13 Desember 1946,

Marthen Indey, Corinus Krey, dan Nicolaas Jouwe mengirim surat protes kepada residen. Dalam surat itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama: (1) Irian harus menjadi bagian dari federasi Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, sesuai wilayah Hindia Belanda; (2) mereka menolak keputusan Belanda yang tidak mengirim wakil dari Irian ke konferensi di Bali, serta menuntut hak orang Irian untuk berbicara di parlemen Negara Indonesia Serikat; dan (3) mereka mengkritik pemerintah Belanda yang selama ini menolak memberikan hak kepada orang Irian untuk memilih, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam politik (Courtouis, 1948:128).

Surat protes ini menunjukkan ketegasan elite Papua dalam menolak kebijakan pemisahan Papua dari Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Nicolaas Jouwe, Lukas Jouwe, Marthen Indey, dan Corinus Krey semula mendukung gagasan integrasi dengan Indonesia. Mereka bahkan menyerukan rakyat Papua untuk bangkit dan meraih kemerdekaan bersama bangsa Indonesia.

Keinginan kuat elite Papua untuk terlibat dalam proses kemerdekaan tercermin dalam kesaksian Marthen Indey kepada Komisi Nieuw Guinea tahun 1950. Saat ditanya siapa pemimpin pemberontakan, Indey menyatakan bahwa pada 1946, ia adalah pemimpin pertama yang memberontak, dan bahwa saudaranya, Nicolaas Jouwe, telah hadir di konferensi Denpasar untuk memprotes kolonialisme Belanda. Namun, faktanya Jouwe tidak pernah diundang ke konferensi tersebut. Kebingungan dan kekecewaan Indey menggambarkan besarnya harapan rakyat Papua untuk berperan dalam menentukan masa depannya (Report of the Committee Nieuw Guinea, 1950:84).

Dalam perkembangan selanjutnya, baik Nicolaas Jouwe maupun Lukas Jouwe mengubah pendirian dan mendukung usulan residen agar Papua tetap menjadi koloni Belanda. Salah satu faktor yang memengaruhi perubahan sikap Nicolaas Jouwe adalah penolakan keras Van Eechoud terhadap pengiriman wakil Papua ke konferensi Denpasar. Pernyataan Marthen Indey kepada Komisi Nieuw Guinea pada

tahun 1950 kembali menegaskan bahwa Jouwe seharusnya hadir di konferensi tersebut. Namun kenyataannya, tidak ada wakil Papua yang diundang. Hal ini memperjelas ambiguitas sikap pemerintah Belanda terhadap status politik Papua, yang akhirnya berdampak pada perubahan sikap sebagian elite Papua.

Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) di Serui

Pada pertengahan Juni 1946, pemerintah Belanda di Batavia mengasingkan G. S. S. J. Ratulangi ke Serui. Ratulangi, yang sebelumnya diangkat sebagai Gubernur Sulawesi oleh Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945, dianggap oleh NICA di Makassar sebagai ancaman terhadap upaya pemulihan keamanan dan pemerintahan.

Selama masa pengasingannya di Serui, Ratulangi bersama Latumahina aktif berdiskusi dengan elite lokal Papua. Ia menjelaskan situasi politik terkini di Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia, sembari menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Melalui komunikasi intensif ini, mereka berhasil memperoleh izin untuk mendirikan partai politik di Serui.

Pada 29 November 1946, Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) resmi didirikan di gedung Sekolah Rakyat di Serui Kota. Ratulangi terpilih sebagai pemimpin umum, dengan tokoh-tokoh seperti Silas Papare, Baldus Dumatubun, Alwi Rahman, Achmad Djalali, A. Wanane, A. Waimuri, Benjamin Kajai, Paulus Pajawa, Barnabas Aninam, dan L. R. Tiwo turut masuk dalam kepengurusan. PKII bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serui sekaligus mempromosikan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Papua. Pada 23 Maret 1948, Ratulangi dan rekan-rekannya dibebaskan dari tahanan dan dipindahkan ke Yogyakarta (Catatan Harian, Stevanus Rumbewas, 1990).

Sepeninggal Ratulangi dari Serui, pemerintah Belanda memperketat pengawasan dan melakukan tindakan represif terhadap para

pegawai pamong praja Papua. Beberapa di antaranya dihukum dan diberhentikan. Untuk mengisi kekosongan administrasi, Belanda mengirimkan asisten bestuur dari Ambon ke kampung Waren dan Wonti. Reorganisasi internal PKII pun dilakukan akibat tekanan ini. Silas Papare terpilih sebagai ketua, dengan Alwi Rahman sebagai wakil ketua.

Pada tahun 1948, Belanda semakin meningkatkan tekanan terhadap PKII dan akhirnya menangkap Silas Papare, yang kemudian dipenjara di Hollandia. Namun, karena perannya selama pendudukan Sekutu, ia segera dibebaskan dan kembali ke Serui, di mana ia tetap melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme Belanda (Meteray, 2012: 82).

Meskipun menghadapi tekanan berat dan penahanan, elite Papua yang mendukung integrasi dengan Indonesia tidak menyerah. Tokoh-tokoh seperti Silas Papare, Benjamin Kajai, Stefanus Rumbewas, dan Alwi Rahman terus menjalin komunikasi dengan pejuang di Yogyakarta. Pada 21 Juli 1949, sebuah radiogram dari pusat meminta agar Papua mengirimkan perwakilannya ke Yogyakarta. Menanggapi permintaan ini, PKII mengadakan rapat dan menetapkan Silas Papare serta Stefanus Rumbewas sebagai delegasi. Namun, karena keterbatasan dana, hanya Silas Papare yang dapat berangkat pada 27 Juli 1949, dengan dukungan finansial dari PKII, termasuk sumbangan sebesar 400 gulden dari Yakop Thung Tjing Ek (Riwayat Hidup Yakop Thung Tjing Ek, n.d).

Setibanya di Yogyakarta, Silas Papare bersama Soeparno, J. Latumahina, dan Nottan mendirikan Badan Perjuangan Irian (BPI) dan menerbitkan surat kabar *Suara Irian*. Melalui media ini, mereka menyebarkan gagasan bahwa Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Komunikasi antara para pendukung Republik di Papua dan Papare di Yogyakarta terus terjalin. Salah satunya adalah Inggamer, anggota PIM di Biak, yang melaporkan perkembangan situasi di wilayahnya, terutama terkait dukungan terhadap Belanda.

BPI mendapat dukungan luas dari berbagai partai politik di Jawa, khususnya di Yogyakarta. Pada 12 Oktober 1949, BPI bersama partai-partai politik menghasilkan resolusi yang mendukung integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Dalam resolusi tersebut, Silas Papare dan Latumahina ditunjuk untuk mendukung delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Aktivitas Elite Politik Papua Pro-Indonesia Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pada tahun 1949–1950, setelah KMB berakhir, banyak orang Indonesia kembali ke daerah asal mereka. Namun, perjuangan politik di Papua tetap berlanjut. Kelompok elite Papua yang tergabung dalam partai seperti Komite Indonesia Merdeka (KIM) dan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) tetap aktif melakukan penolakan terhadap pemerintahan Belanda secara bawah tanah. Banyak orang Papua, terutama dari Serui, mendukung Indonesia. Tokoh seperti Silas Papare dari Serui, serta Corinus Krey, Lucas Rumkorem, dan Zeth Rumkorem dari Biak turut ambil bagian dalam perjuangan. Sementara itu, dari Waropen, Stephan Refasi serta tokoh lainnya seperti Petrus Wetebossy, Marthen, Amos Indey, dan Petrus Sembor juga terlibat aktif. Bahkan, pada tahun 1956, Hermanus Wayoi dan Agus Nenepath secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap Indonesia (Meteray, 2012: 85).

Dukungan rakyat Serui terhadap Indonesia tetap teguh meskipun mendapat berbagai tekanan dari pemerintah Belanda. Perjuangan kelompok elite Serui untuk mempertahankan Serui dan Papua sebagai bagian dari Indonesia terus berlanjut. Hal ini tampak dalam kunjungan Komisi Indonesia ke Serui pada 29 Mei 1950, yang dihadiri oleh tokoh nasional seperti Mr. Muhammad Yamin dan Silas Papare. Dalam pertemuan tersebut, 16 tokoh masyarakat, termasuk Stevanus Rumbewas, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung integrasi Papua dengan Indonesia. Semangat perjuangan yang ditunjukkan masyarakat Serui ini

mendorong pemerintah Belanda untuk segera melakukan tindakan represif. Pada tahun 1951, pemerintah Belanda di Serui memanggil dan menangkap seluruh badan pengurus PKII serta sejumlah pejuang kemerdekaan Indonesia untuk dimintai keterangan, antara lain Alwi Rahman, Barnabas Animan, Stevanus Rumbewas, Alex Beratobui, Benjamin Kajai, Achmad Djalali, dan Yakop Thung Tjing Ek (Riwayat Hidup Yakop Thung Tjing Ek).

Dukungan terhadap perjuangan Silas Papare dan kemerdekaan Indonesia juga terlihat di berbagai wilayah lain, seperti Hollandia, Biak, Kaimana, dan sejumlah kota di Jawa. Wawancara dengan elite Papua seperti Marthen Indey dan Stevanus Rumbewas mengungkapkan bahwa banyak rakyat Papua menolak pemerintahan kolonial Belanda. Akibatnya, pasca-KMB tahun 1950, banyak elite Papua mengalami penahanan. S.D. Kawab mencatat bahwa sejak tahun 1952, setiap peringatan 17 Agustus kerap disertai dengan penangkapan tokoh-tokoh Papua oleh Belanda. Salah satu yang menjadi target penahanan adalah S.D. Kawab sendiri, yang pernah ditahan di Manokwari dan Hollandia karena aktivitas politiknya, sebelum akhirnya dibebaskan menjelang kedatangan Komisi Indonesia.

Upaya perjuangan terus berlanjut. Pada tahun 1958 di Biak, organisasi *Tentara Tjadangan Tjenderawasih* (TTT) dibentuk oleh Lukas Rumkorem setelah ia kembali dari tahanan di Hollandia. Dengan dukungan pemuda setempat, pertemuan-pertemuan rahasia digelar hingga akhirnya TTT resmi berdiri. Menurut J. Tarumaselly, organisasi ini memiliki cabang di berbagai daerah di Papua. Pengurus cabang Biak antara lain Lukas Rumkorem sebagai penasihat, David Woisiri sebagai ketua, dan J. Tarumaselly sebagai sekretaris. Organisasi ini menghimpun para pemuda yang tidak terlibat dalam peristiwa 14 Maret 1948, termasuk pemuda dari luar Papua. Mereka secara diam-diam mengadakan rapat untuk membahas situasi politik, merancang pemberontakan, serta mengirim pemuda untuk bergabung dengan pasukan gerilya (Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat, 1961: 132).

Namun, aktivitas TTT yang bertujuan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia di Papua akhirnya terhenti setelah diketahui oleh pemerintah kolonial Belanda. Pihak Belanda segera melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh penting dalam organisasi tersebut, termasuk David Woisiri, Rafael Maselkosu, J. Tarumaselly, Jonathan Saroy, dan Frits Werluken yang merupakan pengurus cabang TTT di Serui. Mereka dituduh terlibat dalam aktivitas yang dianggap mengancam pemerintahan kolonial. Peristiwa ini menunjukkan upaya sistematis pemerintah Belanda dalam meredam pergerakan nasionalisme Indonesia di Papua (Arsip, J. Tarumaselly, 7 Februari 1961).

Aktivitas Elite Politik Papua Pro Belanda Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB)

Menjelang KMB tahun 1949, elite politik Papua aktif berupaya menentukan masa depan Papua dengan mengikuti perkembangan politik melalui radio dan surat kabar. Mereka berdiskusi secara terbuka mengenai status Papua dan situasi politik Indonesia. Diskusi ini mencerminkan kebebasan dalam menyuarakan pandangan serta kepentingan daerah. Salah satu reaksi awal datang dari Johan Ariks, seorang tokoh kelompok tua Papua di Manokwari. Saat itu, Manokwari menjadi pusat komunitas Indo peranakan di Nugini Belanda setelah Hollandia. Kota ini juga memiliki sejarah penting sebagai pusat misi Kristen sebelum Perang Dunia II.

Pada Januari 1949, Johan Ariks dari Manokwari bersama H.A. Fisher berangkat ke Jakarta. Ariks, seorang guru yang pernah mengunjungi Depok, Tidore, dan Ternate, didampingi Fisher, kepala perwakilan Papua di Indonesia. Mereka membawa surat berisi lima dokumen yang disampaikan kepada Konsulat Jenderal Australia di Batavia (Arsip Nasional Pemerintah Australia [NAA], 1949), yakni:

1. Resolusi para pemimpin adat Papua tertanggal 19 Januari 1949.

2. Ringkasan pembicaraan Johan Ariks dengan P.J. Koets, ketua kabinet Komisi Tinggi Kerajaan di Indonesia.
3. Surat dari Johan Ariks kepada Ketua UNCI beserta tiga lampiran tertanggal 7 Maret 1949.
4. Surat Ariks kepada UNCI yang memuat lampiran terkait masalah Indonesia dan kemungkinan pembentukan Pakta Pasifik.

Kehadiran Johan Ariks di Jakarta bertujuan untuk mencari dukungan dari pejabat Belanda, Australia, dan United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Ia mengatasnamakan rakyat Papua dan memohon agar ada wakil dari Papua yang diikutsertakan dalam KMB. Pada hari yang sama, Ariks juga mengirim surat kepada Dr. J. Beel untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua, termasuk usulan susunan delegasi Papua dalam KMB. Dalam suratnya kepada Ketua UNCI pada 7 Maret 1949, Ariks kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana penggabungan Papua ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), serta harapannya agar orang Papua memiliki perwakilan langsung dalam KMB (NAA, 1949).

Dalam suratnya kepada PBB, Johan Ariks menekankan bahwa Papua berbeda dari Indonesia dalam hal etnis, agama, dan budaya, baik secara fisik maupun mental. Ia menyatakan bahwa hanya orang Papua yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Jika Papua tidak diundang dalam KMB, maka lebih baik tetap berada di bawah pemerintahan Belanda. Ia berulang kali menyampaikan argumen ini dalam surat-menyuratnya dengan pemerintah Belanda, UNCI, dan PBB.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo. Pada 28 Juli 1949, mereka mengadakan diskusi dengan rakyat Papua di berbagai wilayah seperti Hollandia, Sarmi, Biak, Teluk Geelvink, dan Manokwari. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperoleh dukungan terhadap pemerintahan yang sepenuhnya dikelola oleh orang Papua, serta menolak penyatuan dengan

Indonesia. Mereka menegaskan bahwa masa depan Papua harus diputuskan oleh rakyat Papua sendiri tanpa intervensi pihak luar.

Pada 26 Oktober 1949, Marcus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe berangkat ke Belanda menggunakan pesawat KLM, singgah di Bandara Kemayoran, dan melanjutkan perjalanan ke Eropa. Mereka melakukan pendekatan dengan pejabat pemerintahan serta berupaya menarik simpati masyarakat Belanda (De Bruijn, 1978: 308). Pada Januari 1950, Jouwe, Ariks, dan Kaisiepo kembali ke Papua dan melakukan kampanye ke Hollandia, Biak, Yapen, Waropen, dan Manokwari untuk menjelaskan hasil KMB dan dampaknya terhadap posisi Papua.

Menurut laporan Komisi Pemerintah Belanda tahun 1950, kampanye kelompok Ariks menunjukkan bahwa masyarakat Papua lebih mendukung Belanda dibanding Indonesia. Hal ini tercermin dalam petisi yang disampaikan di Hollandia pada 20 Mei 1950 oleh Johan Ariks, Marcus Kaisiepo, dan Nicolaas Jouwe (Report of the Committee New Guinea, 1950: 88). Isi petisi tersebut antara lain:

1. Kami, sebagai masyarakat Melanesia, tidak akan membiarkan nasib kami ditentukan oleh orang Indonesia yang secara etnis dan geografis berbeda dari kami.
2. Kami, masyarakat Papua, tidak membutuhkan pendidikan politik dari partai-partai Indonesia, karena kami tidak pernah menjalani perjuangan nasional seperti orang Indonesia.
3. Kami tidak mengakui partai politik PIDRIS, yang dibentuk oleh bekas tawanan perang dan dianggap mengganggu perdamaian di Papua.

Selanjutnya, pada April 1950, Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo menghadiri Konferensi Komisi Negara-Negara Pasifik Selatan (SPC) di Fiji. Di sana, mereka bertemu dengan komunitas Pasifik Selatan yang memiliki kesamaan ras dan budaya dengan orang Papua. Pemerintah Belanda memanfaatkan momen ini untuk memperkuat narasi bahwa Papua lebih dekat secara kultural dengan bangsa Pasifik daripada Indonesia.

Pada Oktober 1950, Jouwe, Kaisiepo, dan Abdullah Arfan kembali ke Belanda untuk memperjuangkan aspirasi politik Papua. Dalam pertemuan dengan Van Maarseven, Johan Ariks menegaskan penolakan terhadap penyatuan Papua dengan RIS atau Uni Belanda-Indonesia. Meskipun Van Maarseven mendukung prinsip penentuan nasib sendiri, ia juga meminta dukungan kelompok Ariks terhadap pemerintah Belanda. Pertemuan ini mencerminkan ketidaktegasan Belanda dalam menentukan masa depan Papua (Meteray, 2012: 178).

Pada tahun 1951, Nicolaas Jouwe mendirikan Gerakan Persatuan New Guinea (GPNG) di Hollandia sebagai wadah perjuangan untuk penentuan nasib sendiri. GPNG secara terbuka menolak klaim Indonesia atas Papua dan memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi ini didirikan oleh kalangan terdidik Papua yang telah lama bekerja dengan Belanda, sehingga memperoleh legitimasi resmi. Jaringan GPNG tersebar di berbagai wilayah seperti Biak, Manokwari, Sorong, dan Merauke, dan menjadi simbol aspirasi politik rakyat Papua dalam menghadapi tekanan dari Indonesia dan tarik-ulur kebijakan Belanda.

Dukungan terhadap GPNG semakin kuat pada 1955 ketika Marcus Kaisiepo memobilisasi ribuan warga Papua di Hollandia untuk menentang Pemerintah Indonesia. Demonstrasi ini dipicu oleh kegagalan Indonesia membawa isu Papua ke PBB (Lagerberg, 1962: 1967). Aksi-aksi massa yang dipimpin GPNG telah berlangsung sejak 1954, dengan tokoh-tokoh seperti Johan Ariks, Marcus Kaisiepo, dan Nicolaas Jouwe. Di Biak, simpatisan GPNG bahkan mengirim telegram kepada Ratu Juliana di Belanda yang menyatakan bahwa sekitar 500 orang Papua menolak kehadiran dan otoritas Pemerintah Indonesia.

Partai Politik Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pasca KMB, berbagai partai politik mulai bermunculan di Papua sebagai respons terhadap dinamika politik yang semakin mengarah pada kemungkinan perubahan status wilayah. Kemunculan partai-partai ini mencerminkan

beragam aspirasi politik masyarakat Papua—baik yang mendukung kemerdekaan penuh maupun yang condong mempertahankan keterikatan dengan Belanda.

Salah satu partai paling awal yang berdiri adalah Partai Nasional (Parna), yang didirikan di Hollandia pada 10 Agustus 1960 atas gagasan Frits Kirihi, seorang mahasiswa sosiologi non-Barat di Universitas Leiden. Kirihi, yang mengamati perkembangan politik di Papua dari Belanda, menyadari bahwa Belanda sebenarnya meragukan prospek kemerdekaan Papua. Bersama Herman Wajoi dan Amos F. Indey, ia menggagas pembentukan partai politik sebagai wadah perjuangan. Rapat pendirian Parna dilangsungkan pada 10 Agustus 1961 di Hamadi, dengan Herman Wajoi menjabat sebagai ketua, didampingi oleh Amos F. Indey dan S. Malibela dari Sorong. Parna mewakili semangat kaum muda Papua yang menginginkan kemerdekaan lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya.

Kirihi secara tegas menyampaikan visi dan program Parna, yang menekankan pentingnya papuanisasi dalam pemerintahan melalui pelatihan dan kursus bagi orang Papua. Target utamanya adalah agar pada tahun 1970 seluruh fungsi pemerintahan lokal dapat dijalankan oleh orang Papua sendiri. Parna menolak segala bentuk diskriminasi rasial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat Papua dalam politik. Kirihi menyatakan bahwa Papua harus dipimpin oleh orang Papua, bukan oleh orang Eropa, serta menuntut persamaan hak bagi semua kelompok etnis. Ia juga mendorong pendidikan alternatif bagi calon pegawai negeri dan menekankan pentingnya kekuatan politik serta ekonomi sebagai fondasi bagi negara Papua yang merdeka dan berdaulat.

Kehadiran Parna menjadi inspirasi bagi kaum muda lainnya untuk membentuk partai-partai baru. Salah satunya adalah Partai Demokrasi Rakyat (Democratische Volkspartij/DVP), yang dibentuk pada 24 Agustus 1960 di Hollandia oleh Arnold Runtumboy. Sebelumnya, partai ini pernah didirikan oleh L. Jacadewa pada 21 Desember 1957 dengan nama Partai Anti-Revolusioner, namun mengalami reorganisasi hingga menjadi DVP. Meskipun sempat diusulkan untuk bergabung dengan

Parna, usulan tersebut ditolak. DVP didominasi oleh kelompok Indo Belanda dan kurang memperoleh dukungan dari masyarakat Papua, baik di Hollandia maupun di Manokwari. Ketidakpastian politik dan minimnya kepercayaan dari masyarakat Papua menjadi hambatan utama bagi efektivitas gerakan politik DVP, meskipun partai ini tetap melanjutkan program-programnya di tengah tantangan yang ada.

Sementara itu, di wilayah Manokwari, muncul Partai Persatuan Nieuw Guinea (Eenheidspartij Nieuw Guinea/Epang) yang didirikan pada 20 September 1960 oleh Gosewish dengan dukungan kuat dari masyarakat Arfak. Lodewik Mandatjan menjabat sebagai ketua, dan Gosewish sebagai wakil ketua. Seperti halnya DVP di Hollandia, Epang juga didominasi oleh kelompok Indo peranakan dan tidak sepenuhnya merepresentasikan aspirasi murni orang Papua. Menurut J.M. van der Kroef, baik DVP maupun Epang lebih mengakomodasi kepentingan kelompok Indo peranakan dan Belanda, serta turut melibatkan orang Cina. Dalam struktur kepengurusan Epang bahkan terdapat tokoh-tokoh Belanda, yang menegaskan orientasi pro-Belanda partai ini. Dukungan kuat dari suku Hattam, khususnya melalui pengaruh Lodewik dan Barend Mandatjan, menjadi kekuatan utama Epang di Manokwari. Keberadaan partai ini mencerminkan masih kuatnya sisa-sisa pengaruh kolonial dalam politik Papua menjelang masa transisi.

Berbeda dari DVP dan Epang, Partai Kena U Embay yang didirikan oleh Esau Itaar pada 20 November 1960 di Doyo Lama, Sentani (Hollandia), menunjukkan semangat inklusivitas dan persatuan yang lebih kuat. Dalam struktur kepemimpinan partai ini, Agus Kereuta menjabat sebagai wakil ketua dan Willem Assaway sebagai bendahara. Kena U Embay terbuka bagi seluruh penduduk Papua tanpa membedakan latar belakang kebangsaan, wilayah, atau status sosial. Visi utamanya adalah membangun kesatuan dan solidaritas di kalangan masyarakat Papua dalam upaya menuju kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Dengan pendekatan yang non-sektarian dan kolaboratif, partai ini mencerminkan semangat

perjuangan politik yang lebih menyeluruh dan mengakar pada nilai-nilai kolektivitas.

Kemunculan partai-partai ini menggambarkan kompleksitas lanskap politik Papua pada masa pasca-KMB. Di satu sisi, terdapat semangat nasionalisme Papua yang tumbuh kuat di kalangan generasi muda, sementara di sisi lain masih tampak pengaruh kelompok pro-Belanda yang cukup dominan, terutama di kalangan Indo peranakan. Dinamika inilah yang kemudian membentuk fondasi awal perdebatan panjang tentang masa depan politik Papua.

Aktivitas Dewan Papua Menjelang 1961

Pada 1950, pemerintah Belanda merencanakan pembentukan Dewan Papua yang terdiri atas 21 anggota: 10 orang Papua, 9 Belanda, dan 2 non-Belanda. Pemilihnya adalah warga negara Belanda di Papua yang telah tinggal di sana selama tiga tahun dan berusia minimal 21 tahun. Meskipun tanpa mempertimbangkan pendidikan atau penghasilan, pemerintah Belanda berusaha memajukan pendidikan orang Papua agar mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan tersebut.

Dalam *Report on Netherlands New Guinea for the Year* (1960:101) dijelaskan bahwa menjelang awal 1960, berbagai informasi mengenai pemilihan Dewan Papua disebarluaskan melalui selebaran, radio, poster, dan surat kabar. Surat kabar *Pengantara* (2 Juli 1960) membahas hak dan tugas Dewan Papua, sementara *Nieuw Guinea Koerier* (10 November 1960) menginformasikan rencana pembentukan dewan tersebut. Pemerintah Belanda juga menyosialisasikan informasi melalui film, slide, dan media massa lainnya.

Surat kabar yang diterbitkan di Papua pada masa itu menggunakan dua bahasa, yakni Belanda dan Melayu. Format penerbitannya beragam: harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, dan triwulanan. Hingga tahun 1960, tercatat terdapat 10 media massa yang tersebar di berbagai wilayah Papua, antara lain: *Nieuw Guinea Koerier*, *Pengantara*, *De Tifa*, *Triton*,

De Lens, *Fak-Fak Bode*, *Arka*, *Opwaarts* (CWNG), *Mededelingen van de Dienst van Gezondheidszorg*, dan *Madjallah Kita* (Arka).

Melalui media massa tersebut, pemerintah Belanda menginformasikan bahwa pada pertengahan Juni 1960 mereka mengajukan rancangan undang-undang pendirian Dewan Papua sebagai langkah penting menuju pembangunan tata negara dan persiapan kemandirian rakyat Papua. Sosialisasi dilakukan ke berbagai distrik. Di Manokwari, misalnya, diadakan pertemuan di gedung sosial Sanggeng yang dihadiri oleh 150 orang, termasuk penduduk Arfak. Di Hollandia, pemberitahuan pemilihan disebar melalui selebaran pada 13 Oktober 1960 yang memuat sistem pemilihan dan daftar pemilih yang dapat dilihat di setiap distrik.

Dalam Arsip Nasional Pemerintah Australia (NAA, 1961), disebutkan bahwa pemilihan Dewan Papua akhirnya dilaksanakan: secara langsung di Hollandia dan Manokwari, dan secara tidak langsung (melalui tulisan atau bisikan) di wilayah lain. Pemilihan pertama berlangsung pada 11–17 Januari 1961, dengan partisipasi sekitar 260.000 orang dari 14 sub-daerah pemilihan, dari total penduduk sekitar 700.000 jiwa. Di Hollandia, mayoritas yang terpilih adalah orang Papua, bersama enam orang Belanda yang umumnya berprofesi sebagai pastor, guru, polisi, dan pegawai pertanian. Satu-satunya perempuan yang terpilih adalah Herina Pepuho dari Asei Besar, yang saat itu menjabat sebagai kepala keuangan di Hollandia.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, antusiasme masyarakat Papua sangat tinggi. Pada 5 April 1961, Dewan Papua dilantik di Hollandia dengan 28 anggota, terdiri dari 16 orang hasil pemilihan dan 12 orang yang ditunjuk oleh Gubernur. Dari jumlah itu, 22 adalah orang Papua, satu orang berasal dari Kei, dan lima orang Belanda (termasuk Indo-Belanda).

Ketua Dewan adalah J.H.F. Sollewijn Gelpke. Anggota terpilih meliputi: Nicolaas Jouwe (Hollandia), J.O. de Rijke (Hollandia Kota), M. Suway (Nimboran), Marcus Kaisiepo

(Kepulauan Schouten), B. Mofu (Kepulauan Schouten), M.B. Ramandey (Japen-Waropen), E.J. Bonay (Japen-Waropen), H.F.W. Gosewich (Manokwari), Penehas Torey (Ransiki), Abdullah Arfan (Raja Ampat), A.R. van Zeeland (Sorong), A.S. Onin (Teminabuan), D. Deda (Ajamaru), N. Tanggahma (Fak-Fak), Mohamad Achmad (Kaimana), dan A.K. Gebze (Merauke).

Sementara itu, anggota yang ditunjuk meliputi: F.K.T. Poana (Mimika), T. Mezeth (Sarmi), V.P.C. Maturbongs (Mapi), C. Kiriwaib (Muju), A. Samkakai (Kepulauan Frederik), D. Walab (Asmat/Pantai Kasuari), B. Burwos (Manokwari/Steenkool), Dr. F. Chr. Kamma (Kerom), K. Gobai (Paniai), Dr. L.J. van den Berg (Tigi), H. Wonsiwor, dan satu perempuan yaitu D. Tokoro (Nasib Nusa dan Bangsa, 1961:31).

Pada bulan April 1961, menurut *NAA Monthly Report* (1961), Ratu Juliana menyampaikan pernyataan yang memotivasi Dewan Papua untuk mengunjungi Belanda. Delegasi pertama, dipimpin Marcus Kaisiepo, berangkat pada 22 Agustus 1961 dan terdiri atas delapan orang Papua serta dua orang Belanda. Mereka menghadiri pembukaan sidang parlemen Belanda pada 19 September 1961. Delegasi kedua, dipimpin Sollewijn Gelpke, juga melakukan kunjungan serupa.

Tujuan utama kunjungan adalah untuk berdiskusi dengan pemerintah dan parlemen Belanda mengenai perkembangan Papua menuju penentuan nasib sendiri. Marcus Kaisiepo menegaskan bahwa rakyat Papua tidak ingin bergabung dengan Indonesia, dan bahwa isu utama yang akan dibahas Dewan adalah *self-determination*. Pernyataan ini disiarkan secara luas, termasuk oleh Radio Australia.

Setelah kembali ke Hollandia pada 19 Oktober 1961, beberapa anggota Dewan Papua mengadakan pertemuan tertutup dengan 40 tokoh Papua dari berbagai wilayah, tanpa kehadiran orang Belanda maupun wartawan. Pertemuan membahas usulan kepada Ratu Belanda agar menerima proposal Luns tentang konferensi internasional di bawah PBB. Pertemuan ini juga menghasilkan pembentukan

Komite Nasional yang diketuai Willem Inuri, dengan Nicolaas Jouwe sebagai wakil ketua dan Marcus Kaisiepo sebagai sekretaris. Komite ini terdiri dari 18 anggota mewakili seluruh daerah, termasuk pedalaman Papua.

Komite Nasional berwenang memberi masukan kepada Dewan Papua dan pemerintah, serta menentukan kehendak rakyat terkait *self-determination*. Mereka merencanakan pemilihan bendera, lambang, dan lagu kebangsaan pada 1 November 1961. Namun, pembentukan Komite Nasional ditentang oleh sebagian anggota Dewan yang tidak dilibatkan, seperti A.K. Gebze (Merauke), M. Achmad (Kaimana), B. Burwos (Manokwari), dan Penehas Torey (Ransiki). Gebze menyatakan bahwa penduduk selatan tidak mengetahui pendirian Komite Nasional tersebut (Van der Veur, 1962:65).

Wawancara Van der Veur dengan warga pedesaan menunjukkan kekecewaan terhadap Dewan yang dianggap terlalu fokus pada isu internasional dan mengabaikan persoalan lokal. Kritik juga muncul di surat kabar *De Tifa* (29 Juni 1962), yang menyayangkan Dewan lebih memprioritaskan isu politik ketimbang masalah sosial dan ekonomi.

Pada 30 Oktober 1961, Dewan Papua menggelar sidang istimewa untuk membahas isi manifesto. Sidang dibuka pukul 11.00 oleh ketua dewan dan dihadiri 26 anggota: 20 orang Papua dan 6 non-Papua. Pendengar sidang antara lain Boldinggijh, Hoekstra, Lijseen, dan Velkamp (NAA, 1961).

Sidang tersebut menyetujui isi manifesto secara bulat dan rencananya akan diserahkan kepada gubernur keesokan harinya. Pada hari yang sama, pemerintah Belanda menunjuk tiga wakil Dewan Papua—Wonsiwor, Nicolaas Jouwe, dan Tanggahma—untuk menghadiri debat di parlemen Belanda dan PBB di New York.

Pada 31 Oktober 1961, delegasi yang dipimpin Marcus Kaisiepo menyerahkan manifesto kepada Gubernur Platteel. Isi manifesto menyatakan: (1) nama wilayah adalah Papua Barat, (2) penduduk disebut rakyat Papua Barat, (3) bendera yang dipilih diakui sebagai bendera negara, dan (4) lagu kebangsaan yang

diakui adalah “Hai Tanahku Papua” (Griapon, 2007:83).

Pada 1 Desember 1961, diadakan upacara di depan gedung Dewan Papua. Tepat pukul 08.00, nama Nieuw Guinea resmi diganti menjadi Papua Barat, bendera Papua dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan dinyanyikan. Hari itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaan ini berlangsung tertib dan aman.

Menurut *The New York Times* (1961), pengibaran bendera bertujuan menumbuhkan semangat persatuan dan identitas Papua. Drooglever menyebut peristiwa ini sebagai “penyegar semangat dan kesadaran harga diri baru” (2010:582). Namun, laporan wakil pemerintah Australia menyatakan bahwa bendera hanya dikibarkan di tempat umum dan tidak di gedung pemerintah, menunjukkan bahwa pengibaran ini belum menjamin pemberian pemerintahan sendiri.

Setelah rencana Luns gagal pada Desember 1961, Belanda tidak dapat mempertahankan Papua. Di sisi lain, Indonesia meningkatkan diplomasi dan militer, menegaskan bahwa Papua bagian dari wilayah RI (Henderson, 1973:105). Pada Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua, mengibarkan Merah Putih di seluruh wilayah NNG, dan memobilisasi kekuatan rakyat (Lopa, 1962:87).

KESIMPULAN

Elite politik Papua yang terlibat dalam perjuangan status politik Papua antara 1949-1961 berkembang seiring dengan kebijakan Pemerintah Belanda. Munculnya elite politik ini dimulai setelah J.P.K. Van Eechoud merekrut pegawai Indonesia dan tokoh nasionalis Indonesia yang diasingkan ke Papua pada 1946. Aktivitas politik pada periode ini sangat dipengaruhi oleh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Elite politik Papua berasal dari berbagai latar belakang, seperti guru sekolah, polisi, mantri pertanian, kesehatan, dan pegawai pemerintah tingkat kampung. Tokoh-tokoh yang mendukung Indonesia termasuk

Corinus Krey, Silas Papare, dan Marthin Indey, sementara yang mendukung Belanda antara lain Johan Ariks, Nicolaas Jouwe, dan Lodewik Mandatjan. Pembagian dukungan ini mencerminkan ketegangan politik yang terjadi di Papua.

Antara 1949–1961, elite politik Papua yang jumlahnya sangat terbatas berusaha memperjuangkan status politik Papua melalui strategi diplomasi, pengajuan petisi, serta pendekatan langsung kepada pemerintah Belanda. Meskipun gerakan mereka belum terorganisir secara sistematis, upaya ini mencerminkan kesadaran politik yang mulai tumbuh dan perhitungan yang cukup matang. Mereka mencoba membangun identitas politik Papua secara mandiri dan menegaskan aspirasi kedaulatan, meskipun terbentur pada minimnya dukungan internasional. Mereka mulai dengan mengorganisasi pertemuan rahasia dan diskusi untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Elite politik Papua juga berusaha menggalang dukungan dari berbagai kelompok etnis dan agama di Papua untuk menciptakan kesatuan suara. Pembentukan organisasi politik menjadi sarana penting dalam perjuangan ini. Selain itu, mereka menghadiri rapat-rapat penting di tingkat lokal dan nasional untuk memperjuangkan aspirasi Papua. Sebagai bagian dari upaya diplomatik, para tokoh politik Papua membuat resolusi, mengirim surat, dan aktif dalam pertemuan-pertemuan di Jakarta, Yogyakarta, bahkan Belanda. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia dan internasional serta menekan Belanda agar memberikan keputusan yang lebih menguntungkan bagi Papua. Melalui strategi-strategi ini, mereka berupaya memastikan bahwa masa depan politik Papua berada di tangan orang Papua, bukan pihak luar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari keterlibatan elite politik Papua dalam memperjuangkan status daerahnya antara 1949 hingga 1961 tidak selalu memberikan pengaruh langsung terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah Belanda atau pemerintah Indonesia. Namun, perjuangan mereka menunjukkan ketangguhan dan kemampuan mereka dalam menghadapi

tantangan besar. Meski hasilnya belum sepenuhnya menguntungkan pada masa itu, perjuangan politik ini mencerminkan tekad kuat untuk memperjuangkan status wilayah mereka. Upaya ini juga menunjukkan kesadaran dan kematangan politik orang Papua dalam mengartikulasikan aspirasi mereka serta membangun identitas politik yang lebih jelas dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan Papua.

Referensi

Arsip/ Surat Kabar/ Laporan Resmi

De Tifa. (1960, Oktober – 1962, Juni).

Krey, C. (1990, August 7). *Riwayat hidup*.

Ministry of Overseas Territories. (1960). *Report on Netherlands New Guinea for the year 1960, presented to Secretary General of the United Nations pursuant to Article 73(e) of the Charter*.

NAA. (1960, December 2). *Monthly Report: November 1960*. F. A. Bensted. File No. 448/IIc/60.

NAA. (1961, November 6). *Monthly Report: October 1961*. P. J. Mollison. File No. 154/IIc/61.

NAA. (1961, September 1). *Monthly Report: August 1961*. P. J. Mollison. File No. 127/IIc/61.

National Archives of Australia (NAA). (1949, July 30). *Surat Ariks ke Konsulat Jenderal Australia di Batavia dan surat ke PBB di Lake Success, 28 Agustus 1949*. File No. 400/1/ii/1/2.

Netherlands Government. (1949–1960). *Report on Netherlands New Guinea for the years 1949–1960, presented to the Secretary General of the United Nations pursuant to Article 73(e) of the Charter*.

Nieuw Guinea Koerier. (1962, Maret – 1962, September).

Rumbewas, S. (n.d.). *Catatan harian*.

Secretariat of the Netherlands-Indonesian Union. (1950). *Report of the Committee: New Guinea (Irian), Part II: Text and appendixes of the Netherlands main constituent*.

The New York Times. (1961, December 1).

Thung, Y. T. E. (n.d.). *Riwayat hidup*.

Artikel/Jurnal/ Buku

Aditjondro, G. J. (1987). Marthin Indey, pilar perjuangan pembebasan Papua Barat di Jayapura. *Prisma*, (2), 16.

Bottomore, T. B. (2006). *Elite dan masyarakat*. Akbar Yanjung Institute.

Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat. (1961). *Tinjauan situasi Irian Barat*. Jakarta.

Drooglever, P. J. (2009). *An act of free choice: Decolonization and the right to self-determination in West Papua* (T. Stantin, M. van Yperen, & M. de Jager, Trans.). England.

Fiona, S. B., & Kusniati, R. (2020). Status hukum Papua Barat: The right to self-determination atau national integrity? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 1–34.

Griapon, A., & Henderson, W. (Eds.). (1973). *West New Guinea: The dispute and its settlement*. American Asian Educational Exchange, Seton Hall University Press.

Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin. (2023). Elite politik di Indonesia: Akar dan dampak penyalahgunaan hak berdemokrasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 2149–2160.

Kroeft, J. M. van der. (1961). Recent development in West New Guinea. *Pacific Affairs*, 34(3), 46.

Lagerberg, C. I. J. (1962). *Jaren van reconstructie: Nieuw Guinea van 1948 tot 1961*. Zuid Nederlandsche Drukkerij NV.

Lopa, B. (1962). *Djalannya revolusi Indonesia membebaskan Irian Barat*. Perusahaan Pertjetakan Negara Djakarta.

Meteray, B. (2012). *Nasionalisme ganda orang Papua*. Kompas.

Miedema, J., & Stockhof, W. A. L. (Eds.). (1993). *Irian Jaya Source Materials No. 6, Series A: Memorie van overgave No.3 Afdeeling West Nieuw Guinea, Part II*. DSACCUL/IRIS.

Nazala, R. M. (n.d.). A Janus-faced policy: Explaining Indonesian counter diplomacy toward West Papua's quest for nationhood. <https://doi.org/10.7282/t3-pxw4-gx16>

Penyelesaian Persengketaan Irian Barat. (1950). *Rentjana pendirian Komisi-Gabungan Irian Barat bagian Komisi Indonesia*. Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

- Suropati, U. (2019). Solusi komprehensif menuju Papua baru: Penyelesaian konflik Papua secara damai, adil dan bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, (37), Maret.
- Suryawan, I. N. (2011). Komin Tipu Komin: Elit lokal dalam dinamika otonomi khusus dan pemekaran daerah di Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(2), 140–153.
- Van Niel, R. (1970). *The emergence of the modern Indonesian elite*. W. van Hoeve Publishers Ltd.
- Veur, P. W. van der. (1962). West Papua: A new era. *Asian Survey*, 2(8), Oktober.